

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT
UNCLOS 1982**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



Oleh:

MUSTIKA SUKMA UTARI
2020112012

PEMBIMBING:
PROF. FIRMAN HASAN, S.H., LL.M
SRI OKTAVIA, S.H., M.Sc., P.hD

**PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982”

(Mustika Sukma Utari, 2020112012, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, , 2023)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan dengan pemahaman geopolitik wawasan nusantara dan bernafaskan amanat UUD 1945 dalam pergaulan internasionalnya. Hal inilah yang menjadi dasar kebijakan politik Indonesia dalam menyikapi konflik Laut China Selatan yang melibatkan China dan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai *non claimant state*. Solusi konkrit bagi para pihak yang berkonflik masih belum tercapai hingga hari ini, walaupun Filipina telah membawa China ke jalur *Permanent Court of Arbitration*. Poin penting dalam permasalahan penelitian ini adalah bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai solusi konflik di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982, serta solusi yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi klaim sepihak China atas kepemilikan kawasan laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan kepentingan nasional Indonesia?. Setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada pihak yang berkompeten di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa upaya Indonesia dan Negara-negara ASEAN untuk terciptanya *Code of Conduct (CoC)* dengan China merupakan salah satu management konflik terbaik yang bisa dilakukan hingga saat ini. Walaupun CoC bersifat *confidential* dan tidak bisa diakses secara general, namun dengan adanya CoC, sejauh ini eskalasi konflik di kawasan mampu diredam dan tindakan para pihak terukur. Banyak hal positif yang diperoleh Indonesia dengan terlibat aktif dalam proses pembahasan CoC. Selain itu, keberadaan kawasan laut natuna yang masuk dalam klaim *Nine Dash Line* China yang menyimpan banyak potensi migas, perikanan, serta pariwisata merupakan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat RI yang wajib dijaga, dari intervensi pihak luar.

Kata Kunci: Konflik Laut China Selatan, Nine Dash Line, UNCLOS 1982, Kawasan Laut Natuna Utara, Code of Conduct ASEAN.

**"THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
INRESPONDING TO THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT
ACCORDING TO UNCLOS 1982"**

**(Mustika Sukma Utari, 2020112012, Master of Law Study Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2023)**

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country with a geopolitical understanding of *wawasan nusantara* perspective and mandates of the 1945 Constitution. This is the base of Indonesia's political policy in responding to the South China Sea conflict involving China and countries in Southeast Asia. Even though Indonesia declares itself as a non-climant state but it always giving full support to reach the solution. Unfortunately, a concrete legal solution for the parties has not been reached till know, even though the Philippines has taken China to the Permanent Court of Arbitration. An important point in the problem of this research is how Indonesia's diplomacy as a solution to the conflict in the South China Sea based on UNCLOS 1982, as well as the solution carried out by Indonesia in responding to China's unilateral claim to ownership of the North Natuna sea area based on UNCLOS 1982 and Indonesia's national interests?. After conducting research and interviews with competent parties at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, researchers concluded that the efforts of Indonesia and ASEAN countries to create a Code of Conduct (*CoC*) with China is one of the best conflict management that can be done nowadays. Although the *CoC* is confidential and cannot be accessed in general, the existence of the *CoC*, so far the escalation in the region has been able to be suppressed and the actions of the parties measurable. There are many positive things obtained by Indonesia by being actively involved in the *CoC* discussion process. In addition, the existence of the Natuna sea area which is included in China's Nine Dash Line claim is holds a lot of oil and gas, fisheries, and tourism potential. It is part of Indonesia's sovereignty territory that must be maintained, from outside intervention.

Keywords: South China Sea Conflict, Nine Dash Line, UNCLOS 1982, North Natuna Sea Area, ASEAN Code of Conduct.